

SEKURITISASI KEBIJAKAN INDONESIA PADA TENAGA KERJA DALAM PEMENUHAN SDG 8 SELAMA PANDEMI COVID 19

Arin Fithriana, Rendy Putra Kusuma, Ziko Aditya Bangsawan
Universitas Budi Luhur Jakarta, Indonesia

Abstrak

Kekhawatiran akan resesi yang lebih buruk menjadi alasan utama menempatkan pandemi COVID 19 sebagai ancaman keamanan. Pandemi memaksa negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional untuk mengkaji ulang kebijakan yang dibuat, termasuk kebijakan yang tidak populis untuk menyelamatkan dan mengamankan negara dan rakyatnya. Mengkaji ulang ini termasuk kesepakatan bersama dalam sustainable development goal (SDGs). pandemi akan mempengaruhi pencapaian target. Demikian juga dengan pemerintah Indonesia, terpaksa mengkaji ulang kebijakan bahkan menjadi kebijakan yang tidak populis. Pencapaian target SDGs 8 terkait pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak secara umum telah terpengaruhi dengan adanya pemutusan hubungan kerja Bahkan usaha kecil mikro dan menengah juga mengalami imbas dari pandemi ini Dengan memfokuskan pada pelaksanaan SDGs 8, penelitian ini melihat upaya pemerintah Indonesia selama masa COVID 19 berdasarkan acuan dan ketentuan badan internasional. Menggunakan perspektif realis untuk melihat pandemi sebagai ancaman bagi kehidupan manusia (human security), diharapkan dapat menjadi kajian tentang upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam melaksanakan SDGs 8 selama pandemi. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang menggunakan data primer dan sekunder baik dari lembaga resmi pemerintah berupa kementerian maupun perwakilan dari pengusaha masyarakat. Penelitian ini menunjukkan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia bagi penanganan tenaga kerja, terutama yang mengalami pemutusan hubungan kerja dilandaskan pada keamanan manusia secara utuh. Ini terlihat dengan dibentuknya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kebijakan ini berkaitan dengan semua sektor kehidupan manusia, bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Langkah yang dilakukan termasuk merevisi kebijakan kartu prakerja yang untuk perlindungan tenaga kerja terdampak. Memberikan stimulus pada UMKM dan kontraksi rumah tangga menjadi upaya untuk mendukung alokasi rumah tangga dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, termasuk dalam memperoleh pendidikan yang layak.

Kata kunci: *perspektif realism, human security, sustainable development goals, covid-19, Indonesia, tenaga kerja*

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang telah menelan banyak korban telah membatasi aktivitas manusia secara umum yang bukan hanya pekerja, namun juga anak dan orang tua. Dan tentu saja pembatasan untuk menghindari transmisi covid -19 ini telah berdampak pada produktivitas. Ini terlihat dengan adanya penutupan beberapa aktivitas masyarakat, termasuk industri. Perdagangan dunia diperkirakan akan turun antara 13% dan 32% pada tahun 2020 karena pandemi COVID 19 mengganggu aktivitas ekonomi normal dan kehidupan di seluruh dunia (WTO.org, 2020). Perdagangan kemungkinan akan jatuh lebih curam di sektor-sektor dengan rantai nilai yang

kompleks, terutama produk elektronik dan otomotif. Perdagangan jasa mungkin paling langsung terkena dampak COVID-19 melalui pembatasan transportasi dan perjalanan. Volume perdagangan barang dagangan telah turun 0,1% pada tahun 2019, terbebani oleh ketegangan perdagangan dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Nilai dolar ekspor barang dagangan dunia pada 2019 turun 3% menjadi US \$ 18,89 triliun. Nilai ekspor layanan komersial naik 2% menjadi US \$ 6,03 triliun pada 2019. Pandemi COVID-19 berdampak pada jam kerja dan pendapatan, secara global, menghilangkan 6,7 persen jam kerja secara global dalam kuartal kedua tahun 2020 yang setara dengan 195 juta pekerja penuh waktu. Pengurangan besar terjadi di Negara-negara Arab (8,1 persen, setara dengan 5 juta pekerja penuh waktu), Eropa (7,8 persen, atau 12 juta pekerja penuh waktu) dan Asia dan Pasifik (7,2 persen atau 125 juta pekerja penuh waktu). Kehilangan besar diperkirakan terjadi pada berbagai kelompok pendapatan yang berbeda-beda terutama di negara-negara berpendapatan menengah ke atas (7,0 persen, 100 juta pekerja penuh waktu). Ini jauh melampaui dampak krisis keuangan tahun 2008-9. Sektor-sektor yang paling berisiko mencakup layanan akomodasi dan makanan, manufaktur, eceran, dan kegiatan bisnis dan administratif (ILO.org, 2020). Dalam hal ini pada bisnis, baik pekerja maupun pengusaha dinegara maju maupun berkembang memiliki bencana yang sama. Oleh karena itu diperlukan tindakan yang tepat dan mendesak untuk bertahan hidup.

Di Indonesia, jumlah penderita dari sejak adanya kasus pertama pada bulan Maret 2020 hingga bulan April 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hingga pada 23 April 2020 mencapai 7.775 kasus penderita dengan jumlah meninggal 647 jiwa (covid19.go.id, 2020). Meskipun ada kenaikan pada jumlah penderita yang sembuh, namun kasus ini telah berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia. Menurut Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Ida Fauziyah menyebut, total pekerja yang dirumahkan maupun terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 130.456 pekerja. Pekerja yang dirumahkan itu terdiri atas pekerja formal, informal, dan buruh. Data tersebut per 4 April 2020, jumlah perusahaan sektor formal yang di rumahkan dan di-PHK mencapai 3.841 pekerja. Sedangkan untuk kategori buruhnya mencapai 64.412 orang. Kemudian sektor informal yang terdampak PHK atau di rumahkan akibat wabah virus corona mencapai 14.263. Jadi data per tanggal 4 April 2020, yang dirumahkan maupun di-PHK formal, informal ada 83.137. Sedangkan per 6 April 2020 datanya itu total 130.456. berdasarkan data tersebut, PHK terkait wabah sebesar 7.445 pekerja (Karunia, Kompas.com, 2020). Kementerian Ketenagakerjaan menyarankan pengusaha untuk mengurangi biaya operasional untuk menekan jumlah PHK. Namun demikian data tersebut baru dari kementerian tenaga kerja, belum dari kementerian lain dan Jamsostek.

Kondisi ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan skenario terburuk menjadi minus empat persen. Hal ini karena menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2 persen hingga 1,2 persen. Investasi pun akan merosot tajam yang sebelumnya, pemerintah cukup optimistis bahwa investasi akan tumbuh enam persen. Namun, dengan adanya COVID-19, diprediksi investasi akan merosot ke level satu persen atau terburuk bisa mencapai minus empat persen. Sektor UMKM yang biasanya menjadi *safety net* juga mengalami dampak dengan adanya pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial. Untuk mensikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Perpu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang salah satunya sebagai stimulus jaring pengaman sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu (Intan, Voaindonesia.com, 2020). Kebijakan ini merupakan kekhawatiran pemerintah Indonesia pada kelangsungan hidup manusia.

Membahayakan aspek kehidupan manusia menjadi poin penting dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi bersama. Sebagaimana penjabaran sebelumnya bahwa pandemi

ini menyebabkan krisis pada semua aspek kehidupan manusia termasuk ekonomi sebagai aspek pendukung kehidupan manusia secara berkelanjutan. Terkait kehidupan manusia berkelanjutan, kesepakatan global melalui *sustainable development goals* (SDGs) yang sedianya ditargetkan pencapaiannya pada tahun 2030 tentu juga mengalami dampak tersendiri. Semua aktor mengalami transisi, beradaptasi dengan perubahan dan berusaha mencari solusi yang terbaik untuk semua perubahan yang terjadi. Salah satu pencapaian SDGs yang terdampak adalah pada pencapaian target 8 yaitu pemenuhan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. pembatasan interaksi dan aktivitas manusia berdampak pada penurunan produktivitas ekonomi dan pemenuhan pekerjaan yang layak bagi manusia secara umum.

Pandemi COVID 19 telah menurunkan angka pekerja dan produktivitas ekonomi serta mengancam aktivitas ekonomi inklusif atau UMKM. Pandemi sebagai isu global menjadi ancaman kehidupan manusia. Diperlukan kapasitas dan kapabilitas aktor dalam menyelesaikan masalah dari ancaman tersebut. Pencapaian SDGs target 8 menjadi salah satu poin yang terancam dan menghadapi permasalahan. Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk mengkaji bagaimana pemerintah Indonesia berupaya untuk menyelesaikan masalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana target SDGs ditengah ancaman pandemi pada nilai kehidupan manusia. Penelitian akan membatasi pada target SDGs 8.6 yang secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan dan pelatihan. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah ***Bagaimana upaya pemerintah Indonesia pada pelaksanaan SDGs 8 selama Covid 19?***

Meskipun pandemi merupakan kajian baru, namun karena dampaknya bersifat global, terdapat beberapa kajian akademik terkait tema ini, seperti Opini dengan judul *Coronavirus Could Cost The Global Economy \$2,7 Trillion. Here's How* di Bloomberg (Orlik, Bloomberg.com, 2020) telah menjadi rujukan pada artikel *COVID-19: Disease, management, treatment, and social impact* (Ali, 2020). Pada Opini di media Bloomberg tersebut menunjukkan simulasi dengan NiGEM (*National Institute Global Economic Model*) berdasarkan data *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada *Inter-Country Input-Output* (ICIO). Melalui model dan data tersebut dibuat skenario kemungkinan terburuk dampak adanya pandemi di dunia. Besaran dana yang harus dikeluarkan untuk menangani pandemi yang berdampak pada aktivitas ekonomi. Dampak ini memerlukan penanganan, kerjasama dan pemahaman antar pihak untuk mencegah dampak yang lebih meluas. Kedua pendapat ini juga ditegaskan kembali dalam tulisan Saber Yezli dan Anas Khan, bahwa untuk menangani pandemi dan mencegah meluasnya dampak yang lebih buruk tidak menutup kemungkinan pemerintah atau pembuat kebijakan lainnya membuat langkah-langkah yang tidak populis, yang bahkan mungkin dianggap merugikan. Kajian ini mencontohkan langkah yang diambil oleh pemerintah Saudi Arabia dengan menanggukkan kegiatan ibadah Umrah bagi umat Islam, yang tentunya ini keputusan yang tidak populis bahkan menyakitkan bagi umat Islam (Yezli, 2020).

Kajian lain yang menunjukkan bahwa pandemi covid telah mempengaruhi aktivitas ekonomi dengan adanya penurunan pendapatan dan pembatasan aktivitas ekonomi ditulis oleh Timothy Laing dalam *The economic impact of the Coronavirus 2019 (Covid-2019): Implications for the mining industry* (Laing, 2020) yang berpendapat bahwa perlu dilakukan tindakan tersendiri terkait pandemi covid 19 karena menyangkut banyak pekerja yang bukan hanya dari satu negara dan ini berdampak pada ekonomi negara. diperlukan kebijakan tersendiri baik itu penambahan atau pengurangan insentif maupun pendapatan agar pekerja masih dapat bertahan. Kebijakan yang bukan hanya bersifat jangka pendek, namun juga perlu memperhatikan jangka panjangnya mengingat dampaknya bagi kehidupan manusia. Sebagai sebuah pandemi yang

mengancam kehidupan manusia secara utuh, maka diperlukan kerjasama antar pihak dan antar sektor. Karena bukan hanya mengancam kesehatan namun juga aspek lain seperti ekonomi, sosial, bahkan politik. penekanan ini disampaikan dalam *Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020* (Djalante, 2020). Respon pemerintah Indonesia terlihat dengan adanya kinerja yang saling berkesinambungan antar sektor, terutama yang menyangkut keberlanjutan kehidupan manusia. Baik itu kementerian kesehatan, keuangan, komunikasi dan informasi, kementerian desa tertinggal, bahkan kepolisian.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Prosedur-prosedur kualitatif mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya, dan bersumber dari strategi-strategi penelitian yang berbeda-beda (Cresswell, 2010). Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif dituntut untuk dapat mengolah data menjadi sebuah deskripsi penelitian yang dianalisis terhadap data tersebut. Dalam proses pengumpulan data, validasi akan sangat dipengaruhi oleh interpretasi dalam menganalisa data dan implementasi teori terkait topik yang dibahas (Cresswell, 2010). Dengan demikian, penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan tantangan dan upaya pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan SDGs target 8 selama pandemi COVID 19. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian deskriptif-analitis yang menggambarkan dan mencoba mencari penjelasan eksplanasi ilmiah dari realitas adanya pandemi yang dihadapi dunia secara global dan juga Indonesia serta tantangan dan upaya Indonesia selama pandemi COVID 19 berlangsung. Berdasarkan hal tersebut penelitian mendeskripsikan upaya dan tantangan pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan SDGs target 8 selama masa pandemi COVID 19. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sehingga pada penelitian ini juga menunjukkan fakta-fakta bahwa pandemi COVID 19 menjadi ancaman dan tantangan dalam pelaksanaan SDGs target 8 di Indonesia. Pendekatan kualitatif ini juga dipilih karena memiliki pandangan yang lebih luas dalam mencari pola hubungan antar konsep (Idrus, 2009). Penelitian ini juga menjelaskan keterkaitan dan hubungan antar perspektif, teori dan konsep untuk menjelaskan realitas antara realism, human security dan *sustainable development goals*. fokus penelitian didasari dari hasil pengamatan fenomena dalam hubungan internasional dan Studi literatur guna mendapatkan informasi berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan. Berdasarkan studi literature maka dapat dilakukan analisa kebutuhan objek penelitian. Pengumpulan data sebagai dasar untuk mengetahui bagaimana perspektif realism dalam kenyataan empiris dengan adanya ancaman bersama berupa pandemi COVID 19 yang mendorong negara melakukan pengamanan negaranya. Pengamanan ini dilakukan seiring dengan adanya ancaman terhadap kehidupan manusia secara utuh yang saling terkait. Bukan hanya ancaman pada manusia yang menderita penyakit tersebut, namun juga pada seluruh aspek kehidupan manusia. Fenomena tersebut dapat dilihat dari konsep *human security* dengan adanya berbagai ancaman dalam kehidupan manusia terkait pandemi tersebut. Salah satu aspek kehidupan yang terancam adalah pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang didapat dari produktivitas aktivitas ekonomi. Pandemi yang berdampak pada aktivitas global berdampak pula pada aktivitas ekonomi nasional. Adanya pembatasan aktivitas manusia berdampak pada pembatasan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya berimbas pada menurunnya produktivitas dan pendapatan. Penurunan ini memaksa adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), penutupan usaha, dan kebangkrutan. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan dalam pembangunan

berkelanjutan yang selama ini telah disusun sedemikian rupa sesuai dengan rencana dan target. SDGs sebagai rencana dan target yang telah disepakati menjadi salah satu acuan negara dalam untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan pandemi yang menjadi ancaman telah mendorong negara untuk mengkaji ulang kebijakan yang telah dibuat untuk memastikan keamanan warga negaranya. Oleh karena itu data, baik primer maupun sekunder didasari dari cakupan atau lingkup perspektif, teori dan konsep dalam fokus penelitian.

Securitisasi COVID 19 oleh Pemerintah Indonesia

Seluruh dunia pada saat ini sedang dihadapi oleh permasalahan penyebaran COVID-19 yang menimbulkan banyak dampak pada berbagai sektor. COVID-19 menjadi sebuah permasalahan yang menimbulkan ancaman bagi masyarakat dan menjadi isu keamanan bersama. Hal tersebut terkandung dalam penjelasan definisi Sekuritisasi yang diberikan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde dalam Yanyan Mochaman Yani, dkk. “...*bahwa sebuah isu akan menjadi isu keamanan dikarenakan adanya aktor yang mendefinisikan isu tersebut sebagai ancaman yang mengancam keberadaan objek tertentu...*”(Yani, 2017). Selain itu, sekuritisasi pun membicarakan perihal keamanan sektor-sektor dasar manusia, seperti keamanan manusia, keamanan ekonomi, keamanan sosial, dan keamanan politik. Hal tersebut merupakan perkembangan studi keamanan yang bersifat non-tradisional dan dapat menjadi suatu ancaman apabila sektor-sektor keamanan tersebut tidak diperhatikan dengan baik. Sehingga, apabila merujuk dari definisi-definisi diatas dapat dikatakan bahwa COVID-19 merupakan suatu ancaman yang mengancam keberadaan objek manusia dan sosial.

Badan kesehatan dunia WHO pada 11 Maret 2020 menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19(allianz.co.id, 2020). Dengan ditetapkannya status *global pandemic* tersebut, WHO sekaligus mengonfirmasi bahwa COVID-19 merupakan darurat internasional. Artinya, setiap rumah sakit dan klinik di seluruh dunia disarankan untuk dapat mempersiapkan diri menangani pasien penyakit tersebut meskipun belum ada pasien yang terdeteksi. Potensi mudah terinfeksi ini mendorong adanya pembuatan kebijakan lain untuk mencegah penyebaran infeksi. Kebijakan pembatasan merupakan wujud persepsi terhadap ancaman. Namun demikian pembatasan juga berdampak pada menurunnya produktivitas manusia, hingga penurunan produktivitas menjadi ancaman manusia secara utuh. Kehidupan sosial dan ekonomi menjadi terancam. Banyak pekerja yang terpaksa kehilangan pekerjaan, lembaga pendidikan ditutup, dan segala ketentuan menyangkut interaksi manusia. Keputusan pembatasan ini menjadi bagian dari pemahaman dan kesepakatan dalam mendefinisikan pandemi COVID-19 sebagai ancaman. Ini terlihat dengan adanya kebijakan dan keputusan bidang lain yang memungkinkan terjadinya infeksi.

Pada awalnya, kasus pertama COVID-19 di Indonesia terjadi pada 2 Maret 2020 yang diumumkan langsung oleh Presiden dan didampingi oleh Menteri Kesehatan, mengungkapkan bahwa terdapat dua orang WNI yang positif COVID-19. Kedua WNI tersebut pada awalnya diduga telah bertemu dengan WNA asal Jepang yang terdeteksi positif COVID-19 pada saat meninggalkan Indonesia (Akbar, 2020). Sebelumnya, Pemerintah terlihat seperti acuh tak acuh terhadap penyebaran COVID-19 meskipun disebutkan Pemerintah telah melakukan pemeriksaan Kesehatan di sekitar 135 titik di bandara dan tempat-tempat yang menjadi pintu masuk wisatawan asing (kemlu.go.id, 2020). Namun, terlihat pada bulan sebelumnya, Pemerintah lebih memfokuskan pada pemberian kemudahan dan potongan harga di sektor pariwisata yang secara tidak langsung mengundang banyak WNA untuk melakukan perjalanan ke Indonesia. Salah

satunya adalah pemberian paket stimulus senilai Rp10,3 triliun pada sektor maskapai penerbangan, pariwisata, dan perumahan (reuters, 2020). Sehingga terlihat bahwa pemerintah lebih fokus kepada sektor-sektor perekonomian negara dibandingkan fokus kepada kesiapan negara dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Hingga pada 13 Maret 2020, Pemerintah secara resmi menetapkan peraturan yang dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Presiden tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang tepat pada hari itu jumlah pasien positif sebanyak 69 pasien.

Pemerintah mencoba untuk melawan penyebaran COVID-19 dengan cara membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang mengacu pada Keppres Nomor 7 Tahun 2020 dan kemudian diperbarui menjadi Keppres Nomor 9 Tahun 2020, menyebutkan bahwa pelaksanaan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memiliki tugas sebagai berikut; (a) Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19; (b) Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; (c) Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19; (d) Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan (e) Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah (covid19.go.id, 2020). Sementara itu, pemerintah pun memberikan otoritas kepada Kepala Daerah untuk membentuk Gugus Tugas namun berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Ketua Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Selain Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tersebut, sebelumnya Pemerintah telah menerbitkan protokol-protokol yang perlu dijalankan, salah satunya pada saat berada di area dan transportasi publik sebagai tindakan pertama dalam mencegah penularan COVID-19 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2020 (covid19.go.id, 2020).

Pemerintah melakukan uji tes cepat (*rapid test*) secara massal untuk mengetahui dan memahami peta penyebaran virus agar dapat membantu dalam penanganan penyebaran COVID-19 (Arifin, bppb.go.id, 2020). Pemerintah menetapkan penjarakan sosial (*social distancing*) guna meminimalisir penyebaran virus serta ditetapkannya PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dilakukan oleh Kepala Daerah dengan kriteria diantaranya adalah jumlah dan kasus kematian, adanya epidemiologi di tempat lain yang berkoneksi dengan daerah yang akan mengajukan dan melakukan PSBB. Kemudian, Pemerintah melakukan distribusi APD kepada petugas medis di seluruh Indonesia yang dilakukan melalui Kementerian Kesehatan dengan merujuk kepada skala prioritas daerah-daerah yang terdampak oleh COVID-19 (covid19.go.id, 2020). Pemenuhan APD ini mengingat kondisi dan kemampuan masing fasilitas kesehatan yang berbeda dan sebagai bentuk dukungan dan perlindungan kepada tenaga kesehatan yang disebut sebagai garda depan.

Selain itu, Pemerintah Indonesia pun memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai rumah sakit darurat COVID-19 dalam upaya pemerintah menangani kasus pandemi COVID-19. Hal tersebut dilakukan ditengah minimnya jumlah tampung rumah sakit yang menjadi rujukan pasien positif COVID-19 di daerah-daerah tertentu khususnya di Ibukota Jakarta yang merupakan daerah terbanyak jumlah kasus positif COVID-19 (kompas.id, 2020). Kemudian, Pemerintah Indonesia melakukan impor bahan baku Alat Pelindung Diri dan alat pemeriksaan berjenis *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dari Korea Selatan (cnnindonesia.com, 2020). Beberapa tindakan *soft* maupun *hard* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia merupakan suatu bentuk Sekuritisasi dari masalah COVID-19 yang menjadi ancaman bagi objek-objek sosial dalam skala besar. Selain itu, strategi-strategi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi COVID-19 adalah strategi Penjarakan Sosial, Penelusuran Kontak, Edukasi

Penyiapan Isolasi, dan Isolasi Rumah Sakit apabila isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan (covid19.go.id, 2020). Indonesia menjadi salah satu negara yang dipercaya untuk melakukan uji klinis atas salah satu kandidat vaksin yang merupakan kolaborasi dari Bio Farma, FK Unpad, Balitbangkes RS dan BPOM yang diharapkan menjadi titik terang dan dapat membawa hasil bagi Indonesia dan dunia.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia pun berupaya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat ditengah pandemi, mengingat banyak masyarakat yang terdampak pandemi ini. dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada keluarga terdampak COVID disamping bantuan langsung lainnya yang pernah disampaikan pemerintah seperti BLT bagi keluarga kurang mampu ataupun dana desa. Bahkan pada bulan Agustus, pemerintah juga merencanakan pemberian BLT bagi pekerja dengan pendapatan dibawah Rp. 5 juta perbulan sebesar Rp. 600 ribu rupiah selama empat bulan. Kebijakan ini untuk mendorong daya beli masyarakat, terutama kebutuhan pokok. Kebijakan ini didasari pemikiran, jika terjadi peningkatan daya beli, maka diharapkan akan terjadi peningkatan permintaan yang mendorong peningkatan produksi. Kebijakan ini bertujuan akhir pada berjalannya perekonomian negara dan pemulihan ekonomi akibat pandemi. Kebijakan sejenis bukan hanya dilakukan Indonesia, selama masa pandemi, beberapa negara mengeluarkan kebijakan ekonomi terkait pemulihan ekonomi termasuk untuk meningkatkan daya beli semacam BLT. Ada *Universal Basic Income* (UBI) sebagai BLT yang diberikan kepada masyarakat tanpa kecuali. UBI merupakan sebuah program dimana setiap warga negara mendapat uang setiap bulannya dalam jumlah yang sama, tanpa mempertimbangkan warga tersebut bekerja atau tidak (Pransuamitra, cncindonesia.com, 2020). Pemerintah ikut mendorong berbagai kalangan untuk saling berbagi, ditambah adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Pemerintah telah berkomitmen untuk membantu dan memberikan perhatian besar dan prioritas untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 10 juta kepala keluarga (covid19.go.id, 2020).

Selain itu, pemerintah pun menetapkan program perluasan bantuan sosial dan jaring pengaman sosial agar seluruh masyarakat dapat bertahan secara sosial dan ekonomi dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini ditambah adanya dukungan pemerintah kepada pemilik UMKM agar mampu mengembangkan UMKM (ksp.go.id, 2020). Disisi lain, pemerintah mendorong kepada seluruh pelaku UMKM untuk melakukan perdagangannya melalui sistem elektronik agar pelaku UMKM dapat terus melakukan usahanya, sebab akibat pandemi ini menyebabkan adanya pergeseran kebiasaan pola perilaku konsumsi masyarakat yang beralih dari *offline* menjadi *online* (covid19.go.id, 2020). Pemerintah juga merealisasi pemberian bantuan melalui skema dengan beberapa pertama melalui skema bantuan sosial yang akan diberikan kepada pelaku UMKM dengan kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19 agar mampu bertahan dalam situasi pandemi saat ini. Kemudian diberikannya intensif pajak bagi para pelaku UMKM yang memiliki omzet dibawah Rp4,8 miliar pertahun senilai 0% selama 6 bulan atau hingga bulan September 2020 mendatang. Selanjutnya, diberikannya relaksasi dan restrukturasi kredit UMKM yang diberikan kepada para penerima KUR, Umi, PNM Mekaar, dan Lembaga Penyalur Kredit Program Pemerintah dengan bentuk penundaan angsuran dan subsidi bunga selama 6 bulan. Kemudian, perluasan pembiayaan bagi UMKM yang diberikan kepada pelaku UMKM yang belum pernah mendapat pembiayaan dari Lembaga Keuangan maupun sistem perbankan dalam bentuk stimulus bantuan modal kerja darurat bagi pelaku UMKM terdampak Covid-19. Terakhir, pemulihan dan konsolidasi usaha oleh pemerintah melalui kementerian, Lembaga BUMN, dan Pemda yang bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM

terutama pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19 (setkab.go.id, 2020).

Pelaksanaan Pemenuhan SDGS 8.6 Di Indonesia

Kebijakan yang didasari dari securitisasi ini apabila ditinjau dari pelaksanaan SDGs terdapat kesesuaian dengan strategi yang dicanangkan pemerintah pada peta jalan SDGs 8 (bappenas, 2020).

Policy Direction 2020-2024	Strategies	Increasing skilled workers for a competitive human resources	
		<ul style="list-style-type: none"> • Creating a decent and inclusive jobs in the high value-added sectors. • Increasing the investment on labor-intensive sector. • Increasing skills for that are relevant to industrial need and technological advancement through equalizing access to higher education, educational development, and vocational education. • Enhancing skill development's effectivity through future skills' mapping, skills utilization for innovation, and entrepreneurship development based on technology. 	<ul style="list-style-type: none"> • Enhancing skills system through managing vocational institution, expanding cooperation with industry, and developing financial scheme for trainings. • Increasing the vulnerable group (female, poor, disable, and youth) participation in the workforce. • Enforcing equal pay and equal work for all individuals • Developing social security scheme for workers
Policy Direction 2025-2030	Strategies	Increasing productive workers	
		<ul style="list-style-type: none"> • Increasing skilled workers for complex and high-value-added jobs. • Facilitating the transition from agricultural sector to manufacturing sectors. • Increasing the relevance of education and training, particularly in the field of technical and information technology. 	<ul style="list-style-type: none"> • The optimal utilization of creativity and innovation for creating formal jobs. • Implementation of a comprehensive social protection for workers.

Gambar 1. Peta Jalan SDGs 8 Indonesia

Hal yang perlu digarisbawahi pada strategi tersebut adalah meningkatkan keahlian dan ketrampilan pekerja terutama di sektor Teknologi informasi. Kebutuhan akan keahlian ini merupakan hal mendesak terkait globalisasi. Upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan ini terlihat dengan adanya kenaikan ketrampilan remaja pada TIK. Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan persentase ketrampilan Teknologi informasi dan komputer (TIK) pada rentang usia 15-24 tahun. Kenaikan ini sebagai bentuk literasi digital yang dimiliki rentang usia tersebut. Kemampuan ini penting dan dibutuhkan pada era industri 4,0 sebagai kompetensi dasar pekerja.

Tabel 1. Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun Dengan Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK) (bps.go.id, 2020)

2015	2016	2017	2018	2019
51.83	58.21	68.93	77.05	83.58

Interaksi virtual mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Ini terlihat dengan meningkatnya e-commerce, gamer, vlogger baru. Perkembangan ini semakin meningkat terutama pada masa pandemi yang memaksa membatasi diri tidak berinteraksi secara fisik. Ada peningkatan permintaan kebutuhan hidup secara online dan pembelajaran yang dilakukan secara virtual. Bahkan dikarenakan jarak fisik, penggunaan game online juga semakin meningkat.

Aktivitas daring menjadi kebutuhan dan pencaharian baru. Ketrampilan dan kompetensi TIK menjadi penting. Pekerja formal juga pada masa pandemi juga semakin membutuhkan kompetensi TIK untuk mendukung kelancaran pekerjaan mereka. Kekurangan dalam kompetensi menjadi kekhawatiran dan ancaman sendiri. Ada pergeseran nilai terhadap TIK untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa pandemi. Sebelum pandemi, otomatisasi dalam pekerjaan telah berpengaruh dalam penyerapan tenaga kerja. Bahkan dengan adanya otomatisasi ini turut meningkatkan pengangguran (ILO.org, 2020). Otomatisasi dan pandemi menjadi ancaman tersendiri bagi tenaga kerja.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah sinergi antar lembaga dan masyarakat. Jauh sebelum pandemi terjadi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan SDG Indonesia One. Platform ini bukan hanya untuk pendanaan, namun juga peluang investasi, usaha dan kerjasama yang membuka kesempatan bagi warga untuk pekerjaan yang layak. Jumlah dan persentase partisipasi sekolah, terutama pada perguruan tinggi menjadi salah satu data untuk mengukur NEET (*not in education, employment and training*). Istilah NEET merujuk pada rentang usia antara 15 sampai 24 tahun, rentang usia ini menjadi fleksible terkait kondisi negara bahkan terkadang misintrepretasi (ILO.org, 2020). Dari berbagai definisi yang muncul, mereka yang terkategori sebagai NEET, cenderung disamakan dengan pemuda yang putus asa, tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, dan merasa dikucilkan oleh lingkungannya, walaupun sebenarnya tidak selalu berarti demikian. Indikator bahwa seseorang dikategorikan sebagai NEET jika memenuhi dua kondisi yaitu (i). tidak bekerja (pengangguran atau tidak aktif) dan (ii). tidak memperoleh pendidikan ataupun pelatihan dalam 4 (empat) minggu terakhir sebelum survei dilakukan (idfebui.org, 2020).

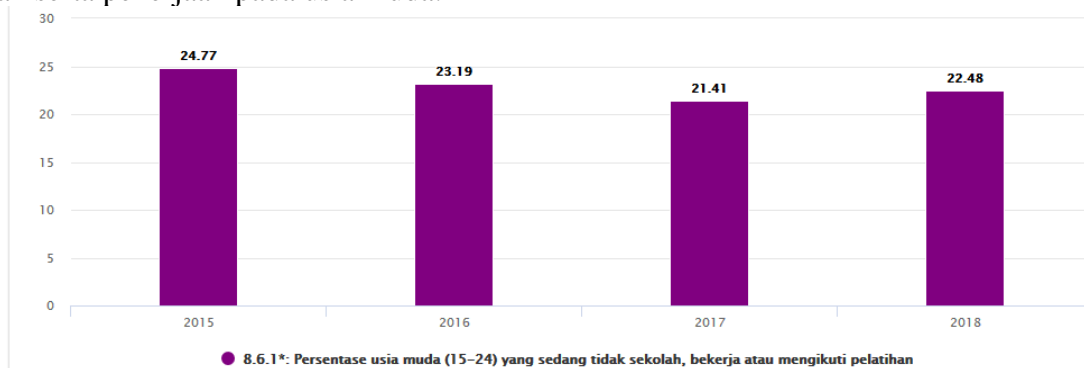
Berdasarkan Tren Ketenagakerjaan Global terbaru untuk Kaum Muda 2020: Teknologi dan masa depan pekerjaan (GET Youth 2020) menunjukkan bahwa, sejak laporan GET Youth sebelumnya pada tahun 2017, terjadi tren peningkatan status NEET. Pada tahun 2016 terdapat 259 juta anak muda yang tergolong NEET, yang meningkat menjadi sekitar 267 juta pada tahun 2019 dan diproyeksikan akan terus meningkat menjadi 273 juta pada tahun 2021. Secara persentase, trennya juga meningkat - dari 21,7 persen pada tahun 2015 menjadi 22,4 persen pada tahun 2020. Tren ini menyiratkan bahwa target yang ditetapkan oleh komunitas internasional untuk secara substansial menurunkan tingkat NEET pada tahun 2020 akan terlewat (ILO.org, 2020). Pandemi menjadi kekhawatiran dan ancaman tersendiri yang mungkin memperburuk kondisi.

Penggunaan terminologi ini menjadi konsep bersama dalam pencapaian SDGs 8. Awalnya sebagai indikator dan perhatian terhadap kelompok putus sekolah yang muncul dikalangan remaja pada tahun 2000-an. Indikator tersebut telah memperoleh bobot yang cukup untuk diusulkan sebagai satu-satunya target khusus remaja untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 8 “Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja penuh dan produktif dan layak bekerja untuk semua”. Dalam Tujuan tersebut, pemuda diidentifikasi dalam dua target yang diusulkan: (i) pada tahun 2030 terpenuhinya lapangan kerja produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua perempuan dan laki-laki, termasuk untuk kaum muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang setara untuk pekerjaan yang bernilai sama, dan (ii) secara substansial pada tahun 2020 mengurangi proporsi kaum muda yang tidak bekerja, pendidikan, atau pelatihan (NEET).

Di Indonesia, hak untuk bekerja diabadikan di dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan 28 ayat (1). Selain pengakuan atas hak untuk bekerja di bawah UU No.11/2005 tentang Ratifikasi ICESCR, dan juga ratifikasi berbagai konvensi ILO, Indonesia juga memiliki

UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 yang memberikan dasar hukum untuk perlindungan mayoritas elemen kerja layak. Meskipun sudah ada pengakuan hukum terhadap hak untuk bekerja, diperkirakan bahwa 60 persen masyarakat yang bekerja masyarakat yang bekerja berada dalam lapangan kerja rentan dan juga satu dari tiga orang dibayar rendah. Terjadi kecenderungan ekonomi formal diinformalkan, dan kepatuhan terhadap peraturan upah minimum juga masih rendah (jdih.kemnaker.go.id, 2020). Terkait dimensi kolektif hak untuk bekerja, Indonesia menunjukkan tren penurunan jumlah dan kepadatan serikat pekerja kepadatan serikat pekerja.

ILO mencatat bahwa tingkat kepadatan serikat pekerja hanya sekitar 12 persen untuk seluruh karyawan pada 2009.2 Selain itu, selain Serikat Pekerja, inspektur buruh/pekerja juga memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan pengusaha dalam memenuhi hak pekerja di tempat kerja. Namun, jumlah inspektur masih rendah dan tidak cukup dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Indonesia. Target SDGs 8.6 bahwa pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan dengan indikator persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). Indikator pencapaiannya sesuai dengan indikator pencapaian global. metode penghitungan diperoleh dengan cara membagi jumlah akumulasi usia muda yang berstatus tidak sekolah, tidak bekerja, tidak mengikuti training atau pelatihan dengan jumlah penduduk usia muda (15 – 24 tahun) dikali 100 persen. Manfaat pengukuran ini untuk mengetahui persentase penduduk usia muda yang tidak bersekolah, bekerja dan mengikuti pelatihan, sebagai proksi keterbatasan akses dalam memperoleh pendidikan, pelatihan serta pekerjaan pada usia muda.



Gambar 2. Persentase NEET Indonesia (sdgs.bappenas.go.id, 2020)

Sebaran NEET dengan angka tinggi (lebih besar dari 26 persen) antara lain Jawa Barat 26,52 persen, Sulawesi Utara 29,96 persen dan Gorontalo 26,60 persen. Sedangkan wilayah dengan persentase NEET antara 0 sampai 15 persen yaitu Bali 9,16 persen dan Yogyakarta 12,6 persen. Terlihat disini bahwa kedua daerah yang dikenal dengan destinasi wisata ini banyak mengembangkan industri rumah tangga dan kreatif sebagai pendukung pariwisata. Industri ini banyak menyerap tenaga kerja muda dengan ketrampilan dan keahlian tertentu (sdgs.bappenas.go.id, 2020)

Jauh sebelum pandemi terjadi, bahkan sejak masa orde baru, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan pengembangan sumber daya manusia melalui Balai Latihan Kerja (BLK). BLK merupakan merupakan pengembanan dari PPKPI (Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri) yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan industri di Indonesia. Namun pada perkembangannya, kebutuhan pekerja dengan kompetensi tertentu sangat dibutuhkan, sehingga bukan hanya hanya pada pengembangan industri, namun juga pada bidang keahlian dan kompetensi lainnya. Keberadaan BLK dibawah Kementrian Tenaga kerja. Hingga saat dibuat

laporan ini, baik BLK maupun PPKPI masih berfungsi sebagaimana mestinya. PPKPI ini memiliki tugas pokok Melaksanakan dan mengembangkan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan konsultasi pelatihan tenaga kerja.

Selain itu, untuk mendorong kerjasama antar pihak dan inklusifitas, pemerintah juga mengembangkan BLK Komunitas. BLK komunitas merupakan BLK yang dibina dan dikembangkan oleh komunitas masyarakat. Komunitas ini mendukung peningkatan keahlian dan ketrampilan masyarakat sekitar sehingga siap untuk bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensi komunitas tersebut. Dukungan pemerintah pada BLK komunitas ini diwujudkan dengan adanya bantuan dana dan pendampingan bagi komunitas yang mengajukan ijin pendirian BLK. Sejak tahun 2017 hingga 2019 telah didirikan 1.113 BLK komunitas yang tersebar di lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, dhammasekha dan pasraman di seluruh Indonesia. pengembangan BLK Komunitas ini bertujuan untuk membuka akses kepada masyarakat sekitar untuk mendapatkan ketrampilan sesuai kebutuhan pasar lokal. Pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan pasar lokal dan mendorong adanya kewirausahaan masyarakat. BLK sebagai media untuk mendapatkan ketrampilan (skilling), alih ketrampilan (re-skilling) ataupun menambahkan ketrampilan (up-skilling) di instansi pelatihan vokasi yakni di 305 BLK Pemerintah, 5.020 LPKS, 109 Lembaga Pelatihan K/L lain, 1.799 Training Center (TC) Industri, dan 1.113 BLK Komunitas. Adapun 10 program pelatihan vokasi yang dikembangkan di BLK Komunitas adalah Kejuruan Teknik Otomotif (Teknik Sepeda Motor), Kejuruan Teknik Las; Kejuruan Processing (Pengolahan Hasil Pertanian), Kejuruan Processing (Pengolahan Hasil Perikanan); Kejuruan Woodworking; Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi; Kejuruan Menjahit; Kejuruan Refrigeration dan Teknik Listrik; Kejuruan Industri Kreatif; dan Kejuruan Bahasa. pelatihan vokasi bersama Ditjen Binalattas dengan 12 perusahaan/industri yaitu PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Cybermantra Perkasa Sumberarta, PT Daikin Airconditioning Indonesia, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Cisco International Limited, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, PT. H.M. Sampoerna, TBK, Tekno Sains Academy ITS, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan USAID.

Tingginya NEET dan pengangguran di Indonesia juga mendorong pemerintah untuk mengembangkan sekolah kejuruan demi menciptakan tenaga kerja siap pakai. Pada masyarakat awalnya terdapat stereotip bahwa SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) hanya bagi siswa yang tidak tertampung pada sekolah menengah umum. Stereotip ini bahkan diperkuat dengan adanya kasus tawuran atau perkelahian antar pelajar yang seringkali dilakukan oleh siswa SMK. Namun dengan adanya prestasi dan kepuasan stakeholder atas kinerja lulusan SMK yang lebih siap, menaikkan permintaan kebutuhan lulusan SMK. Beragam sekolah kejuruan dikembangkan dengan spesifikasi tertentu. SMK bukan hanya dikelola oleh pemerintah, namun juga oleh swasta atau yang berafiliasi dengan perusahaan tertentu. Penekanan pada pencapaian SDGs adalah “*no one left behind*” dalam hal ini diperlukan kerjasama antar pihak untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sektor swasta memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Bahkan beberapa sektor swasta juga menyadari pentingnya pencapaian SDGs untuk keberlanjutan usaha dan perusahaan. Untuk itulah beberapa perusahaan berkerjasama mendukung pencapaian SDGs dalam IBCSD (*Indonesia Business Council for Sustainable Development*). Kelompok bisnis ini menyadari bahwa dengan mendukung pencapaian SDGs, mereka lebih kompetitif dan mampu mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Masing-masing perusahaan memiliki fokus pada tujuan tertentu terkait dengan bidang usaha yang dikembangkan (ibcsd.or.id, 2020). Misalnya perusahaan APR (Asia Pacific Rayon), Indah Kita dan Cap Panah Merah memfokuskan pada SDGs 15 yang menekankan pada keberlanjutan

lingkungan hidup. Prakteknya perusahaan tersebut bukan hanya berfokus pada lingkungan hidup, namun juga meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekerja dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup untuk mendapatkan produk yang berkelanjutan. Disini dapat dikatakan bahwa pencapaian salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan akan didukung dengan pencapaian tujuan lainnya. secara tidak langsung peningkatan kapabilitas pekerja akan mendorong pencapaian tujuan 8 SDGs.

Discussion

Dunia masih dalam fase awal krisis Covid-19 yang luas. Kematian dan infeksi terus meningkat. Ekonomi berada dalam krisis yang mendalam dan berkembang. Bahkan menimpa kelompok masyarakat yang selama ini mampu bertahan melalui usaha kecil mikro dan menengah. Ketimpangan di dalam suatu negara dan di antara negara-negara semakin meningkat. Kelompok miskin menjadi bagian yang paling rentan terhadap infeksi dan kematian dikarenakan lebih baik berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka terpaksa mempertaruhkan nyawa untuk terhindar dari kemiskinan dan kelaparan. Bahkan terjadi lonjakan kemiskina dan ketimpangan global. Ketimpangan ini jelas berpotensi pada ketegangan global. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres telah dengan tepat menyebut krisis ini terburuk sejak Perang Dunia II. Konsekuensi ekonomi dapat menyaingi dampak Depresi Hebat pada 1930-an (imf.org, 2020).

Kajian terkait pencapaian SDGs secara global akan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi menekankan pada inklusivitas dan penyesuaian dengan kemampuan wilayah. Dalam hal ini negara memiliki kondisi yang berbeda terkait pencapaian SDGs. Hal yang disepakati bersama dalam pencapaian SDGs pasca pandemi adalah “*bring back better*” (ibcsd.or.id, 2020) Semua pihak, bukan hanya negara berharap bahwa pasca pandemi kondisi diharapkan lebih baik, bahkan jauh lebih baik daripada masa sebelum terjadi pandemi. Sebelum masa pandemi setiap negara memiliki mekanisme tersendiri terkait pencapaian SDGs yang melibatkan banyak pihak. Demikian juga Indonesia. Dalam mencapai SDGs tujuan 8 sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak demi mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dampak pandemi memaksa berbagai sektor untuk melakukan rasionalisasi atas kinerja dan produktivitasnya untuk tetap dapat bertahan. Baik formal maupun non formal, pemerintahan maupun swasta, produksi barang maupun jasa. Rasionalisasi ini baik berupa pemotongan tunjangan yang diterima ataupun merumahkan pekerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK), bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena akan berimbas pada sektor lainnya. contoh adanya PHK yang dilakukan oleh perusahaan jasa otomotif dan transportasi, bahwa rasionalisasi ini terpaksa dilakukan mengingat berkurangnya aktivitas produksi. Jasa otomotif dan transportasi salah satunya mendukung pelaksanaan kegiatan logistik. Maka ketika kegiatan logistik berkurang, akan mempengaruhi aktivitas jasa. Sejak bulan April 2020 hingga bulan Agustus 2020 telah hampir sepuluh persen dilakukan rasionalisasi berupa pengurangan karyawan dari total 6000 karyawan¹ Demikian juga dengan produktivitas home industri, diperlukan strategi dan upaya tersendiri untuk tetap bisa bertahan. Misalnya home industri jasa catering yang memasok makanan ke kantin sekolah dan perkantoran, selama pandemi mengalami penurunan dan terpaksa mengurangi jumlah pekerja. Meskipun jumlah pegawai dibawah sepuluh orang namun tetaplah pengurangan akan berdampak pada kehidupan pekerja. Diperlukan strategi lain

¹ Interview Bapak Zainal Abidin, Human Capital Tunas Rental Group Bintaro, (skrip telampir)

untuk tetap bertahan seperti membuat produk lain dan mencari pasar alternatif termasuk melalui penjualan online.² Dua contoh ini menunjukkan bahwa pandemi bukan hanya berdampak pada perusahaan dengan skala usaha besar dan jumlah pekerja besar, namun juga pada home industri dengan pekerja kecil. Pandemi berdampak dan mengubah kondisi ekonomi masyarakat.

Pada sektor formal pemerintahan, dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil, Pengurangan ini telah menjadi ketentuan dan kebijakan pemerintah untuk mengurangi krisis ekonomi dengan pengalihan dana. Untuk mengantisipasi adanya protes dan kekacauan terkait menurunnya aktivitas ekonomi, pemerintah melalui kemenakertrans juga membuat beberapa ketentuan bagi perusahaan yang merumahkan pekerja. Salah satunya dengan adanya pelaporan dan kesepakatan dengan pekerja. Persyaratan ini merupakan bentuk kemanusiaan mengingat kondisi sosial ekonomi yang memburuk. Bagi perusahaan, melakukan PHK juga bukan hal yang mudah, dibutuhkan kalkulasi tersendiri untuk mempersiapkannya. Apalagi jika pekerja yang bersangkutan tidak bermasalah, tentu dibutuhkan kejelasan terkait hak pekerja.³ Akan banyak rasionalisasi, maka akan banyak berdampak pada kehidupan manusia. Ketika sebuah kepala keluarga terdampak, maka akan berdampak pada anggota keluarga. Anak-anak menjadi kesulitan dalam memperoleh haknya, termasuk pendidikan, kesehatan, bahkan pangan. Meskipun pemerintah berusaha mencari solusi terkait pandemi, namun ada saja kendala yang dihadapi ketika diterapkan di masyarakat yang beragam.

Mensikapi hal tersebut, pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 20 Juli 2020 (Ihsanuddin, 2020). Komite ini dibentuk mengingat pandemi Covid-19 telah membahayakan perekonomian nasional. Aktivitas ekonomi yang melambat berdampak pada banyak sektor. Komite yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden ini terdiri atas beberapa komite. Komite yang dipimpin oleh Erick Tohir sebagai ketua pelaksana ini antara lain; 1. Komite Kebijakan; dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dibantu enam menteri lainnya yang menjabat sebagai wakil ketua komite. Keenam menteri tersebut yakni: Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Komite Kebijakan mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. b. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis, serta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan COVID-19, serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.

Komite ke-2 adalah Satuan Tugas Penanganan Covid-19; Satgas Covid-19 tetap diketuai oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Satgas ini akan berfokus bekerja di sektor kesehatan. Antara lain a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat c. melakukan pengawasan

² Interview Ibu Ihda Yuliasuti, Sakina Catering, (skrip telampir)

³ Interview Bapak Zainal Abidin, Human Capital Tunas Rental Group Bintaro, (skrip telampir)

pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 dan d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan.

Komite ketiga adalah; Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. dipimpin oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin. Satgas ini akan fokus pada pemulihan ekonomi. a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional; b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, termasuk permasalahan yang dihadapi sektor-sektor usaha riil secara cepat dan tepat; c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan.

Selain itu, dialokasikan pula untuk insentif usaha Rp 120,61 triliun yang diturunkan melalui insentif pajak dan stimulus lainnya. Kemudian, dukungan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp 123,46 triliun. Dana ini dialokasikan untuk subsidi bunga, mendukung restrukturisasi kredit UMKM, dan dukungan penjaminan. Tak hanya itu, dana ini juga mencakup pembiayaan Investasi untuk Koperasi melalui lembaga pengelolaan dana bergulir untuk koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM). Selain itu, dukungan lainnya diberikan kepada pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun. Dana dialokasikan untuk mendukung restrukturisasi kredit bisnis padat karya, dukungan penjaminan, penyertaan modal negara (PMN), dan dana talangan untuk modal kerja. Berikutnya, pemerintah juga memberikan dukungan untuk Sektor Kementerian atau Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah, yaitu sebesar Rp 106,11 triliun. Dana ini dialokasikan untuk program padat karya K/L, insentif perumahan, dukungan untuk sektor pariwisata, dana insentif regional untuk pemulihan ekonomi, cadangan dana alokasi fisik khusus, fasilitas pinjaman daerah, dan cadangan perluasan. Implementasi penanganan Covid-19 dan PEN Lebih lanjut, Airlangga kemudian menjelaskan implementasi penanganan Covid-19 dan program PEN yang memerlukan upaya akselerasi demi mempercepat pemulihan ekonomi.

Upaya akselerasi akan mendorong daya beli masyarakat dan kinerja dunia usaha selama masa pandemi. Akselerasi itu pun diwujudkan ke dalam empat langkah. Pertama, pemerintah melakukan restrukturisasi dan penjaminan kredit modal kerja UMKM dan korporasi padat karya. Kedua, penempatan dana pemerintah di bank umum mitra dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk selanjutnya kredit dikucurkan kepada sektor riil, UMKM dan dunia usaha. Ketiga, pemerintah memberi dukungan bagi pemerintah daerah, salah satunya melalui pinjaman daerah. Keempat, pemerintah memberi dukungan lewat insentif listrik bagi industri, bisnis, dan sosial. Adapun, saat ini pemerintah telah menempatkan dana di Bank Himbara sebesar Rp 30 triliun dan BPD sebesar Rp 11,5 triliun. Penempatan dana ini diharapkan akan membantu implementasi program PEN. Sementara itu, perluasan penjaminan kredit modal kerja kepada korporasi padat karya akan membantu memenuhi kebutuhan korporasi padat karya atas tambahan kredit modal kerja. Hal ini dilakukan agar dapat kembali melakukan aktivitas secara maksimal selama masa pandemi. Airlangga juga menyebut, pemerintah terus memberikan dukungan tambahan kepada UMKM melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus selama masa pandemi. Dia menekankan, tambahan subsidi bunga atau margin KUR, penundaan angsuran pokok, dan relaksasi ketentuan restrukturisasi KUR telah diberikan kepada penerima KUR. Selain itu, calon penerima KUR juga telah menerima fasilitas kemudahan berupa relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR dan relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi.

Strategi kebijakan tersebut diambil mengingat perkembangan ekonomi global dan Indonesia yang terus menurun selama pandemi. Airlangga menjelaskan, pandemi ini bukan saja menciptakan menciptakan krisis kesehatan, tetapi juga memberikan efek domino terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keuangan. Hal ini terjadi seiring dilakukannya pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka membatasi penyebaran wabah. Pada 2020 ini, ekonomi global diproyeksikan kontraksi dan sebagian besar negara di dunia menghadapi ancaman resesi. Untuk mempertahankan konsumsi rumah tangga, maka dilakukan Kontraksi konsumsi rumah tangga untuk menekan di tengah kinerja investasi dan perdagangan internasional yang juga terbatas. Dari sisi sektoral, dua sektor utama yang memiliki kontribusi terbesar serta berhubungan dengan aktivitas ekonomi masyarakat adalah sektor perdagangan dan manufaktur. Kedua sektor ini masing-masing berkontraksi -7,57 persen dan -6,19 persen. Mengingat kedua sektor ini merupakan sektor dengan serapan tenaga kerja tertinggi, maka dampaknya terhadap penghasilan dan konsumsi masyarakat semakin besar. Namun demikian, lanjut Airlangga, sektor pertanian masih mampu tumbuh positif 2,19 persen begitu pula sektor Informasi dan Komunikasi yang tumbuh tinggi 10,88 persen (Gewati, kompas.com, 2020).

Sebelum masa Pandemi, pemerintah Indonesia telah lama mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengupayaan pencapaian SDGs juga telah dilaksanakan dengan sinergi antar lembaga. Selama masa pandemi, kondisi menjadi melambat dan penuh ketidakpastian. Pembatasan interaksi dan jaga jarak berimplikasi pada banyak hal. Kartu pra kerja yang telah dicanangkan mengalami penyesuaian dalam tata kelola Perpres 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Perpres 76 tahun 2020 diantaranya adalah penambahan peserta yang dibolehkan yaitu pekerja atau buruh yang terkena PHK dan pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja dan memasukkan pekerja yang dirumahkan, pekerja bukan penerima upah termasuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Perpres 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja menambahkan 1 BAB khusus tentang pelaksanaan program kartu prakerja yaitu BAB IIA tentang Pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Perubahan ini juga untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, sebagaimana yang ditetapkan. Harapannya program kartu pekerja berkontribusi menciptakan lapangan kerja baru dan sebagai mekanisme *self help* bagi calon pekerja atau pekerja yang telah di PHK. Dapat dikatakan apa yang dilakukan pemerintah dengan membentuk komite ini pada akhirnya berkenaan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara umum.

Selama pandemi pemerintah dengan program kartu prakerja menawarkan berbagai pelatihan yang bersifat online. Tentu saja ada evaluasi terhadap program tersebut. Program prakerja telah berjalan selama tiga gelombang, namun pemerintah menghentikan pelaksanaan gelombang ke empat berdasarkan evaluasi yang diambil bahwa paket pelatihan tidak efektif. Keputusan yang dibuat pada 30 Juni 2020 ini berdasarkan surat nomor S-148/Dir-Eks/06/2020 oleh Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. Evaluasi berdasarkan empat temuan di lapangan terkait pelaksanaan paket pelatihan. *Pertama*, beberapa mitra platform digital Kartu Prakerja membuat dan menawarkan produk paket pelatihan (*bundling*) yang terdiri dari beberapa jenis atau kelas pelatihan yang diselenggarakan oleh satu atau beberapa lembaga pelatihan di masing-masing platform digital. *Kedua*, tidak ada mekanisme yang dapat memastikan bahwa setiap peserta yang mengambil atau membeli paket pelatihan menyelesaikan seluruh jenis atau kelas pelatihan yang ditawarkan dalam paket pelatihan tersebut, setelah mereka mendapatkan insentif

tunai. *Ketiga*, sebagai akibatnya, tidak ada laporan mengenai penilaian peserta pelatihan terhadap instruktur, sarana prasarana, dan program pelatihan untuk satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada dalam masing-masing paket pelatihan tersebut. *Keempat*, manajemen pelaksana tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan evaluasi terhadap satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada di dalam masing-masing paket pelatihan tersebut (cnnindonesia.com, 2020). Penghentian ini bukan berarti menghentikan program Kartu Prakerja karena yang dihentikan hanya penawatan paket pelatihan. Bentuk ketidakpuasan terhadap pelaksanaan paket pelatihan program Kartu Prakerja ini juga terlihat pada beberapa komentar yang berada dilaman Kartu Prakerja dan Kemenakertrans. Ini menjadi tantangan pemerintah dalam skilling, up-skilling, dan re-skilling tenaga kerja Indonesia.

Tantangan lain yaitu pada pelaksanaannya yang bersifat daring (online) hanya dapat diikuti oleh peserta yang memiliki kemampuan untuk mengakses laman secara online. Tantangan ini sama persis dengan yang dihadapi dalam proses pembelajaran daring. Bahwa tidak semua siswa siap dan mampu melaksanakan pembelajaran daring dikarenakan membutuhkan sarana dan prasarana tertentu. Bahkan beberapa sekolah juga belum siap untuk melaksanakannya. Sebagian besar kondisi ini terjadi di wilayah pedesaan dengan tingkat ekonomi rendah. Ironisnya ini juga terjadi di wilayah urban dimana banyak siswa dan guru kesulitan dalam belajar dan menyampaikan pelajaran. Bahkan dikarenakan kondisi perekonomian keluarhga menurun, siswa dan termasuk mahasiswa terpaksa menunda dan bahkan drop-out dari tempat belajar karena tidak mampu memenuhi biaya sekolah secara online. Kondisi ini mengkhawatirkan bagi kelangsungan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Tidak menutup kemungkinan akan menambah jumlah NEET di Indonesia.

Meskipun demikian masih ada harapan untuk meningkatkan kompetensi NEET melalui BLK Komunitas. Beberapa BLK Komunitas terutama pada masa *new normal*, masih menjalankan aktivitasnya pada masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini terlihat juga adanya penawaran pelatihan oleh PPKPI pada bidang-bidang kejuruan yang dapat diterapkan langsung dimasyarakat secara gratis, seperti las listrik, tata busana, AC sentral, AC Tata Udara, Otomotif sepeda motor, kendaraan ringan, design grafis dan lainnya. Untuk memperbaiki kondisi NEET, terutama pada masa pemulihan ekonomi, pemerintah Indonesia dapat mencontoh apa yang telah dilakukan beberapa negara seperti Jepang "*Hello Work for New Graduates*" yang memberikan layanan konseling, bantuan mencari kerja, wawancara, seminar dan bursa kerja. Serta program "*Youth Camp*" untuk meningkatkan kemampuasn sosial. Norwegia juga dapat dijadikan contoh dengan menerapkan "*Pilot Project*" yaitu menempatkan spesialis pemuda dalam waktu empat hari perminggu dilingkungan SMA/SMK/ sederajat melalui konseling, bimbingan karir dan kesempatan pengalaman kerja. ILO juga telah membuat simulasi tentang pilihan kebijakan apa yang dapat dilakukan dengan berbagai kondisi NEET yang disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas negara. Apa yang telah dilakukan Jepang dan Norwegia serta yang disarankan ILO beberapa telah dilaksanakan Indonesia. Pemerintah telah berusaha menjadi lebih baik, namun ketimpangan sosial ekonomi, infrastruktur dan geografi menjadi salah satu tantangan dalam menerapkan kebijakan.

Kesimpulan

Pencapaian SDGs selama pandemi mengalami banyak kendala. Perlu strategi tersendiri yang saling berkesinambungan dan kerjasama lintas sektor. Pencapaian SDGs Indonesia yang secara umum masih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya memerlukan perhatian khusus. Bonus

demografi, kesenjangan sosial ekonomi, kondisi geografi dan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan target 8. Pemerintahan Joko Widodo kedua memiliki tantangan yang cukup berat. Program yang telah dicanangkan berupa Kartu Prakerja merupakan dukungan untuk program pengembangan sumber daya manusia yang telah ada sebelumnya. Adanya BLK komunitas dan PPKPI menjadi upaya yang cukup baik, terlebih dengan adanya keterlibatan korporasi dan lembaga pendidikan tinggi sesuai spesialisasi. Bimbingan karir dan konseling baik ditingkat sekolah (SMA/SMK/Sederajat) juga telah dilakukan oleh pemerintah untuk membuka pemikiran dan jalan bagi calon pekerja. Kemenakertrans juga membuka peluang untuk konseling. Pendirian SMK dengan berbagai jurusan yang semakin variatif mendorong adanya pekerja terampil yang siap kerja. Namun demikian pandemi global tidak dapat dihindari dan harus dihadapi bersama. Upaya pemerintah melalui percepatan pemulihan ekonomi membutuhkan dukungan dan perhatian semua pihak. Program Kartu Prakerja yang menjadi bagian dari BLT dan bantuan sosial menjadi upaya untuk tetap menjaga daya dukung masyarakat terhadap pembangunan. Pemerintah juga mensyaratkan kondisi tertentu pada rasionalisasi yang dilakukan oleh korporasi. Dalam hal ini sektor swasta dan non formal memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi termasuk dalam mengatasi pengangguran. Oleh karena itu stimulus terhadap UMKM dan Rumah tangga menjadi hal mendasar untuk tetap bertahan.

Daftar Pustaka

[Trade forecast press conference: Remarks by DG Azevêdo](https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm), Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy, https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm

Press Release, ILO: COVID-19 causes devastating losses in working hours and employment, https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740893/lang--en/index.htm

Bambang P. Jatmiko, "Menaker: Total Pekerja Dirumahkan Maupun PHK Capai 130.456 Orang", <https://money.kompas.com/read/2020/04/06/165525226/menaker-total-pekerja-dirumahkan-maupun-phk-capai-130456-orang>.

Gita Intan, 2 April 2020 Menkeu: Dampak Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 bisa Minus 0,4 persen, <https://www.voaindonesia.com/a/menkeu-dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.html>

Tom Orlik, Jamie Rush, Maeva Cousin and Jinshan Hong, *Coronavirus Could Cost The Global Economy \$2,7 Trillion. Here's How*, <https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-pandemic-global-economic-risk/>

Imran Ali, Omar M.L. Alharbi, COVID-19: Disease, management, treatment, and social impact, *Science of the Total Environment* 728 (2020) 138861, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.1388610048-9697/> © 2020 Published by Elsevier B.V.

Saber Yezli dan Anas Khan , COVID-19 social distancing in the Kingdom of Saudi Arabia: Bold measures in the face of political, economic, social and religious challenges, *Travel , Medicine and Infectious Disease*, <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101692> Received 31 March 2020;

Received in revised form 15 April 2020; Accepted 19 April 2020, 1477-8939/ © 2020 Published by Elsevier Ltd

Timothy Laing, *The economic impact of the Coronavirus 2019 (Covid-2019): Implications for the mining industry*, The Extractive Industries and Society (2020), doi:<https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.04.003>

Riyanti Djalante et al, Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020, Progress in Disaster Science 6 (2020) 100091, <http://dx.doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.1000912590-0617>/© 2020 The Author(s). Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

John W. Cresswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Pustaka Pelajar, 2010, hal. 258.

Muhammad Idrus. 2009. Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Erlangga. hal.147

Yani, Mochamad Yanyan, Ian Montrarama, Emil Wahyudi. 2017. “Pengantar Studi Keamanan”. Intrans Publishing:Malang. Hal 38

<https://www.allianz.co.id/explore/detail/yuk-pahami-lebih-jelas-arti-pandemi-pada-covid-19/101490>

Akbar, Jihad. Kompas.com. 2020. “Perjalanan Pandemi COVID-19 di Indonesia, Lebih dari 100.000 Kasus dalam 5 Bulan. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/28/060100865/perjalanan-pandemi-covid-19-di-indonesia-lebih-dari-100.000-kasus-dalam-5?page=all>. Diakses pada 30 Juli 2020.

Kementerian Luar Negeri. 2020. “Langkah dan Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani dan Menghadapi Virus Novel Corona 2019 (N-Cov)”. <https://kemlu.go.id/pretoria/id/news/4771/langkah-dan-upaya-pemerintah-indonesia-dalam-menangani-dan-menghadapi-virus-novel-corona-2019-n-cov>. Diakses pada 30 Juli 2020.

Reuters. 2020. “Indonesia Unveils Nearly \$750 mln Stimulus Package in Response to Virus Outbreak”. <https://www.reuters.com/article/indonesia-economy/indonesia-unveils-nearly-750-mln-stimulus-package-in-response-to-virus-outbreak-idUSJ9N29001A>. Diakses pada 30 Juli 2020.

Keputusan Presiden Republik Indonesia. 2020. “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”. Pasal 6.

Covid19.go.id. 2020. Protokol. <https://covid19.go.id/p/protokol?page=8>. Diakses pada 30 Juli 2020.

Arifin, Danung. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2020. “Gugus Tugas Berlakukan Rapid Test Massal Identifikasi Penyebaran COVID-19”. <https://bnpb.go.id/berita/gugus-tugas-berlakukan-rapid-test-massal-identifikasi-penyebaran-covid19>. Diakses pada 30 Juli 2020.

Covid.go.id. 2020. “Syarat Pemberlakukan PSBB Bagi Pemerintah Daerah”. <https://covid19.go.id/p/berita/syarat-pemberlakukan-psbb-bagi-pemerintah-daerah>. Diakses pada 30 Juli 2020.

Covid.go.id. 2020. “Pemerintah Segera Distribusikan 105.000 APD”. <https://covid19.go.id/p/berita/pemerintah-segera-distribusikan-105000-apd>. Diakses pada 30 Juli 2020.

Kompas.id. 2020. “Upaya Pemerintah Menangani Pandemi Covid-19”. <https://kompas.id/baca/foto/2020/04/01/upaya-pemerintah-menangani-pandemi-covid-19/>. Diakses pada 30 Juli 2020.

CNN Indonesia. 2020. “RI Impor Bahan Baku untuk 1 Juta APD dan Alat PCR Korsel”. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200420172633-92-495377/ri-impor-bahan-baku-untuk-1-juta-apd-dan-alat-pcr-korsel>. Diakses 30 Juli 2020.

Covid.go.id. 2020. “Empat Strategi Pemerintah Atasi COVID-19”. <https://covid19.go.id/p/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-covid-19>. Diakses pada 30 Juli 2020.

Covid.go.id. 2020. “Indonesia Siap Uji Klinis Kandidat Vaksin Covid-19”. <https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/indonesia-siap-uji-klinis-kandidat-vaksin-covid-19>. Diakses pada 30 Juli 2020.

Covid.go.id. 2020. “Upaya-upaya Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19”. <https://covid19.go.id/p/berita/upaya-upaya-pemerintah-penuhi-kebutuhan-pokok-masyarakat-di-tengah-pandemi-covid-19>. Diakses pada 30 Juli 2020.

Putu Agus Pransuamitra, Ada Konsep UBI di Belakang BLT Pekerja Swasta ala Jokowi, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200809192428-4-178520/ada-konsep-ubi-di-belakang-blt-pekerja-swasta-ala-jokowi>

Covid.go.id. 2020. “Upaya-Upaya Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19”. <https://covid19.go.id/p/berita/upaya-upaya-pemerintah-penuhi-kebutuhan-pokok-masyarakat-di-tengah-pandemi-covid-19>. Diakses pada 3 Agustus 2020

Kantor Staf Presiden. 2020. “Tiga Strategi Utama Pemerintah Atasi COVID-19”. <http://ksp.go.id/tiga-strategi-utama-pemerintah-atasi-covid-19/index.html>. Diakses pada 3 Agustus 2020.

Covid.go.id. 2020. “Sistem E-Commerce Jadi Solusi Bagi Pelaku UMKM di Tengah Pandemi COVID-19”. <https://covid19.go.id/p/berita/sistem-e-commerce-jadi-solusi-bagi-pelaku-umkm-di-tengah-pandemi-covid-19>. Diakses pada 3 Agustus 2020.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2020. “Kebijakan Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Berhasil Tingkatkan Penyaluran KUR Bulan Juni”. <https://setkab.go.id/kebijakan-pemulihan-ekonomi-di-masa-pandemi-berhasil-tingkatkan-penyaluran-kur-bulan-juni/>. Diakses pada 3 Agustus 2020

Ministry of National Development Planning/
National Development Planning Agency, Road Map of SDGs Indonesia Toward 2030, hal 76

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/07/12/1530/proporsi-remaja-dan-dewasa-usia-15-24-tahun-dengan-keterampilan-teknologi-informasi-dan-komputer-tik-menurut-provinsi-2015-2019.html>

Global Employment Trends for Youth 2020, Youth exclusion from jobs and training on the rise diakses dari https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_737053/lang--en/index.htm

Technical Brief No.1 ILO, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_343153.pdf

Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Menghadapi Fenomena Memutus Mata Rantai Hopeless Kaum Muda Indonesia, NEET, <https://ldfebui.org/wp-content/uploads/2020/07/Buku-NEET-Hopeless-Kaum-Muda-REV-22-6-20-1.pdf>

Global Employment Trends for Youth 2020, Youth exclusion from jobs and training on the rise diakses dari News | 09 March 2020 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_737053/lang--en/index.htm

Undang-Undang Republik Indonesianomor 11 Tahun 2005tentangpengesahan Internasional Covenant On Economic, Social Andcultural Right (Kovenan Internasional Tentanghak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/5.pdf

BPS, <http://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/#!/layouts/layout3.html>

<https://www.ibcsd.or.id/work-program/>

<https://blogs.imf.org/2020/06/25/financial-conditions-have-eased-but-insolvencies-loom-large/>
IMF, 2020a

Webserie 1 IBCSD -Social Pillar dengan tema No One Left Behind: Private Sector and Government Synergy for Social Welfare, Kamis, 9 Juli 2020, 10.00-12.00Wib, Zoom Webinar

Interview Bapak Zainal Abidin, Human Capital Tunas Rental Group Bintaro, (skrip telampir)

Interview Ibu Ihda Yuliasuti, Sakina Catering, (skrip telampir)

Ihsanuddin, Mengenal Komite Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jurus Baru Jokowi Hadapi Pandemi, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/21/10434871/mengenal-komite-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional-jurus-baru-jokowi?page=all>.

Mikhael Gewati, Menko Airlangga Paparkan Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/05/16420141/menko-airlangga-paparkan-strategi-kebijakan-pemerintah-dalam-pemulihan?page=all>.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200702125648-532-520002/pelatihan-kartu-prakerja-dihentikan-bukan-programnya>